

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
KANTOR KECAMATAN SUMBER  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**



**KANTOR KECAMATAN SUMBER  
Jl. Raya Sumber No . 2 Telp. (0295) 5504464**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Sumber tahun 2019. LKJIP SKPD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Sumber dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ,Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kantor Kecamatan Sumber telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Sumber, 5 Pebruari 2020

**CAMAT SUMBER**

**KAMDANI, S.IP, S.Sos**

NIP. 19630302 198602 1 005

**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN.....	6
	A. Latar Belakang.....	6
	B. Landasan Hukum.....	6
	C. Maksud dan Tujuan.....	7
	D. Gambaran Umum Organisasi.....	7
	E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras.....	10
	F. Isu Isu Strategis.....	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	14
	A. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	14
	B. Perjanjian Kinerja 2019.....	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
	B. Perbandingan antara Renstra lama dan Renstra Baru .....	26
	C. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV	PENUTUP.....	31
	A. Tinjauan Umum Keberhasilan.....	31
	B. Permasalahan atau Kendala .....	32
	C. Strategi Pemecahan Masalah.....	32

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Penetapan Kinerja Tahun 2019

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan Kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di harus memberikan pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Guna mewujudkan visi dan Misi Bupati khususnya Misi I “ **Mewujudkan Pemerintahan yang cepat tanggap, tranparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintah yang amanah** “ ,Maka Kecamatan sumber menetapkan tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan dari Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumber

Sasaran Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa
3. Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja
4. Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2019, Kantor Kecamatan Sumber telah melaksanakan 5 program utama dan 40 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 702.572.500. -

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 4 sasaran, rata-rata sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian **sasaran-1** : yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, menunjukkan bahwa dari beberapa indicator belum mencapai target yang telah ditetapkan dari 100 % tercapai 60 %,hal ini

dikarenakan adanya perubahan regulasi pelayanan perijinan UMKM dan Pelayanan SKTM

Sementara pada pencapaian **sasaran-2** yaitu dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Desa, mencapai 100 %. Hal ini dibuktikan dengan Semua desa yang telah menyusun LPPD,LKPJ,SPJ Dana Desa,APBDEsa ,Melaksanakan Kegiatan Musrenbang Desa serta Lunas bayar PBB di masing masing desa.

Untuk capaian **Sasaran -3** yaitu Meningkatnya tertib Pelaporan Administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja dari mencapai 100 % dari Target yang telah ditetapkan

Hal ini disebabkan karena adanya Penyusunan Laporan Keuangan ,Laporan Renja dan Laporan LKjIP disusun dan dikirim tepat waktu

Untuk Capaian **Sasaran -4** yaitu untuk Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat , mencapai 100 % sesuai target yang telah ditetapkan .Hal ini dibuktikan bahwa di Kecamatan Sumber tidak ada Laporan Pengaduan Masyarakat terkait K3. Untuk mencapai Sasaran 4 telah dilaksanakan kegiatan Pemantuan Desa Rawan Bencana dan Kegiatan Pembinaan Linmas.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

### **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 kantor Kecamatan Sumber adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

### **D. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan Sumber terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
  - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepagawaian
  - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan fungsi serta tata Kerja Kecamatan, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Camat
  - a. Tugas Pokok  
Mengkoordinasikan Penyelenggaraann Pemerintahan,Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Layanan Umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan Perencanaan , perumusan dan pelaksanaan kebijakan ,pengkoordinasian,pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan ,hukum,keuangan,kerumahtanggaan,kerjasama,kearsipan,dokumen,keorganisasian dan ketatalaksanaan ,kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian ,hukum,keuangan ,kerumahtanggaan,kerjasama,hubungan masyarakat,arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
4. Pengkoordinasian,pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan kecamatan ;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan sisten pengendalian intern pemerintah ( SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan kecamatan ;
  8. Pelaksanaan Pemantuan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas Pokok :
- Melakukan penyiapan bahan perumusan Pengkoordinasian ,pelaksanaan,pemantuan ,evaluasi serta pelaporan meliputi : pembinaan ketatausahaan,hukum ,kehumasan ,keorganisasi dan ketata laksanaan, kerumah tanggaan,kearsipan ,kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- Tugas Pokok :
- Melakukan penyiapan bahan perumusan ,pengkoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi serta pelaporan bidang i perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Tugas Pokok :
- Melakukan penyiapan bahan perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan,evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan,pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik ditingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah dibidang tata pemerintahan ;
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas Pokok :
- Melakukan penyiapan bahan perumusan ,pengkoordinasian,pelaksanaan pemantauan,evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penyiapan konsep rcaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik ditingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantuan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundang, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah dibidang seksi ketentaman dan ketertiban umum.

**E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana**

**1. Susunan kepegawaian :**

Jumlah Pegawai Kecamatan Sumber 25 Pegawai terdiri dari

Pembina Tk.I ( IV.a) : 1 org

Penata Tk.I ( III.d ) : 5 org  
 Penata ( III.c ) : 2 org  
 Penata Muda Tk.I ( III.b ) : 2 org  
 Penata Muda ( III.a ) : 1 org  
 Pengatur Tk.I ( II.d ) : 2 org  
 Pengatur ( II.c ) : 5 org  
 Pengatur Muda Tk.I ( II.b ) : 4 org  
 Pengatur Muda ( II.a ) : 3 org  
 Juru Tk.I ( I.d ) : - org  
 Juru ( I.c ) : - org  
 Juru Muda Tk.I ( I.b ) : - org  
 Juru Muda ( I.b ) : - org  
 Pegawai tidak tetap : 4 orang

## 2. Daftar Inventaris Barang

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4
1	Bangunan Pembawa Air	1	Baik
2	Mobil	2	Baik
3	Gedung Kantor	5	Baik
4	Sepeda Motor	11	2 Rusak
5	Mesin Ketik	1	Baik
6	Portable Water pum	1	Baik
7	Almari Kayu	6	Baik
8	Papan Informasi Pegawai	2	Baik
9	Papan nama instansi	2	Baik
10	Zice	1	Baik
11	Kipas Angin	8	2 Rusak
12	Meja rapat	10	Baik
13	Meja tulis	21	Baik
14	Meja telepon	1	Baik
15	Kursi biasa	74	27 Rusak
16	Bangku Tunggu	4	Baik

<b>No</b>	<b>Nama Barang/ Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Ket.</b>
17	Kursi plastik	100	Baik
18	Ac Spilt	4	Baik
19	Televisi	3	Baik
20	Soundsistem	3	Baik
21	Radio Gora	1	Baik
22	Cassete Recorder	1	Baik
23	Amplifier	1	Baik
24	Wirreless	1	Baik
25	Unit Power Supply	1	Baik
26	Papan pengumuman	1	Baik
27	Tustel	1	Baik
28	P C Unit	2	Baik
29	Laptop	7	Baik
30	Komputer	1	Baik
31	Printer	10	2 Rusak
32	Potable genering set	1	Rusak
33	Karpet	1	Baik
34	Kamera	1	Baik
35	Meja kerja pejabat	1	Baik
36	Kursi kerja pejabat	20	Baik
37	Dispenser	1	Baik
38	Kalkulator	2	Baik
39	Proyektor	1	Baik

## **F. ISU ISU STRATEGIS**

Dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi Kecamatan Sumber tidak lepas dari berbagai permasalahan dan Isu Strtegis yang dihadapi .Antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan Anggaran belum berbasis kebutuhan dan permasalahan
2. Belum Berjalanya Sistem Pelapoaran dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan secara rutin
3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumber
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang kerja Operasional PATEN
5. Masih Rendahnya Pengetahuan dan Ketrampilan Perangkat desa dalam Pengelolaan administrasi Desa
6. Penetapan APBDEsa yang tidak Tepat waktu
7. Belum Tersedianya basis data terpadu berbasis TI di Tingkat Desa dan Kecamatan
8. Banyaknya usulan program dan kegiatan hasil musrenbang desa dan kecamatan yang tidak dapat terealisasi
9. Belum terlaksananya kegiatan inventarisasi penyajian data ijin UMKM karena pelayanan perijinan melalui Sistem Aplikasi OSS
10. Belum tersedianya penentuan status social masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait data miskisn.

11. Keterbatasan SDM untuk melakukan penegakan peraturan dan penertiban umum

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Tahun 2019 Kantor Kecamatan Sumber bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Kemandirian Desa;
3. Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja;
4. Meningkatnya Rasa aman Masyarakat;

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapinya Misi I Bupati Rembang yaitu "***Mewujudkan Pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah***"

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2018 telah menetapkan 7 program 25 kegiatan .

### **A. Rencana Strategik**

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

### 1. Tujuan

Penerapan Tujuan didasarkan pada identifikasi faktor factor kunci keberhasilan ( Critical suscces factor ) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi .Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,kebijakan ,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tujuan yang akan capai oleh Kantor Kecamatan Sumber , yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumber
2. Meningkatnya Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Desa
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

x

### 2. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik,terinci ,terukur dan dapat dicapai

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima(5) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;  
Dengan indikator sebagai berikut :
  - Jumlah pelayanan Perekaman KTP,
  - Jumlah pelayanan KK,
  - Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk,
  - Jumlah Pelayanan Dispensasi Nikah,
  - Jumlah Pelayanan Numpang Nikah,
  - Jumlah Pelayanan SKTM,
  - Jumlah Pelayanan SKCK,
  - Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin HO/IMB,
  - Jumlah Pelayanan Ijin UMKM
  - Jumlah Pelayanan PPAT
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

- Presentase pelunasan PBB
  - Jumlah Desa yang menyusun LPPD
  - Jumlah Desa yang menyusun LKPJ
  - Jumlah Desa yang menyusun SPJ
  - Jumlah Desa yang menyusun APB Desa
  - Presentase pelunasan PBB
  - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
  - Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa
  - Jumlah Desa yang Peserta Musrenbangcam
  - Prosentase Lembaga Desa yang aktif
3. Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja
- Dokumen LKjIP
  - Dokumen Laporan Keuangan
  - Dokumen Laporan Renja
4. Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat
- Dengan Indikator sebagai berikut :
- Jumlah Pemantuan Desa Rawan Bencana
  - Pembinaan Anggota Hansip/Linmas
  - Pelaksanaan HUT RI
  - Prosentase tindak lanjut pengaduan Masyarakat

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Adapun Rencana Kinerja dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Kantor Kecamatan Sumber dengan kepala daerah Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.125 Dok 3.000 Dok	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.216.300.000,-
	2. Jumlah pelayanan KK	300 Dok		
	3. Jumlah pelayanan Pindah Penduduk	95 Dok 130 Dok		
	4. Jumlah Pelayanan Dispensasi Nikah	1.550 Dok	Program Peningkatann Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.102.725.000,-
	5. Jumlah Pelayanan Numpang Nikah	300 Dok		
	6. Jumlah Pelayanan SKTM	200 Dok	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	Rp.12.250.000,-
	7. Jumlah Pelayanan SKCK	50 Buah		
	8. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin HO/IMB	50 Buah	Program Peningkatan Displin aparatur	Rp. 5.000.000,-
	9. Jumlah Pelayanan Ijin UMKM			
	10. Jumlah Pelayanan PPAT			

Meningkatnya Kemandirian Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Desa yang Menyusun LPPD</li> <li>2. Jumlah Desa yang Menyusun LKPJ</li> <li>3. Jumlah Desa yang Menyusun SPJ</li> <li>4. Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa</li> <li>5. Prosentase Pelunasan PBB</li> <li>6. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral</li> <li>7. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang desa</li> <li>8. Jumlah desa yang peserta Musrenbangcam</li> <li>9. Prosentase Lembaga Desa yang aktif</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>12 Kali</p> <p>100 %</p> <p>18 Desa</p> <p>100 %</p>	Program Penunjan Pemerintah Kecamatan	Rp.309.297.500-
Tertib Pelaporan administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Keuangan</li> <li>2. Dokumen LKjIP</li> <li>3. Laporan Renja</li> </ol>	<p>2 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.12.000.000,-
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pemantauan Desa Rawan Bencana</li> <li>2. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas</li> <li>3. Pelaksanaan HUT RI</li> <li>4. Prosentase Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat</li> </ol>	<p>14 Desa</p> <p>18 Desa</p> <p>1 Kali</p> <p>100 %</p>	Program Peningkatan Fungsi Pemerintah Desa	Rp.45.000.000,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sumber Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

### 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2019 , Kantor Kecamatan Sumber telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Kantor Kecamatan Sumber sebagai tempat pelayanan Publik yang optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai, maka sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 5 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke tiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, 10 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.125 3.000	1.874 2.088	88 % 70 %	126 % 80 %	202 % 185 %
	2. Jumlah pelayanan KK	300	198	67 %	77 %	188 %
	3. Jumlah pelayanan Pindah Penduduk	130	145	111 %	173 %	71 %
	4. Jumlah Pelayanan Dispensasi Nikah	95 1.550	70 277	74 % 18 %	166 % 300 %	71 % 108 %
	5. Jumlah Pelayanan Numpang Nikah	300	223		20 %	95 %

6. Jumlah Pelayanan SKTM	20	8	75 % 40 %	70 %	160 %
7. Jumlah Pelayanan SKCK	50	0	0 %	80 %	-
8. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin HO/IMB	50	5	10 %	-	10 %
9. Jumlah Pelayanan Ijin UMKM					
10. Jumlah Pelayanan PPAT					
<b>Rata-rata capaian sasaran 1</b>			<b>55,3%</b>	109 %	109

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari 9 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa ada indikator yang capaian kinerja yang kurang dari target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya regulasi baru untuk pengurusan SKTM, Pelayanan Perijinan UMKM dan adanya Pelayanan Setifikat massal di beberapa Desa di Kecamatan Sumber .

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -1** , diantaranya adalah :

1. Dengan adanya Sistem Pelayanan Ijin UMKM secara On line maka kecamatan tidak dapat Menginventarisir Jumlah Pelayanan UMKM;
2. Dengan adanya regulasi baru untuk pengurusan SKTM dengan syarat adanya Data di SLRT MPM ;

Pencapaian kinerja **sasaran-1** Tahun 2019 sesungguhnya mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Dengan adanya Sistem Pelayanan Ijin UMKM secara On line maka kecamatan tidak dapat Menginventarisir Jumlah Pelayanan UMKM;
2. Dengan adanya regulasi baru untuk pengurusan SKTM dengan syarat adanya Data di SLRT MPM ;

Adapun realisasi capaian target Renstra periode 2016 s/d 20121 sampai dengan pada tahun 2019 mencapai 60 %

- Efisiensi =  $100 \% - \left( \frac{333.275.993}{336.275.000} \times 100 \% \right)$   
= 1 %

- Efektivitas =  $\left( \frac{101}{100} \times 100 \% \right)$   
= 101 %

## **b.Sasaran -2**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, dengan 9 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Jumlah Desa yang menyusun LPPD	100 %	100 %	100%	100 %	-
	2. Jumlah Desa yang menyusun LKPJ	100 %	100 %	100%	100 %	-
	3. Jumlah Desa yang tetib menyusun SPJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Jumlah Desa yang menyusun APBDesa	100 %	100 %	100 %	99,75 %	100 %
	5. Prosentase Pelunasan PBB	12 Kali	100 %	100 %	100 %	-
	6. Rapat Koordinasi Lintas sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	7. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	18 Desa	12 Kali	100 %	100 %	100 %
	8. Jumlah Desa yang Peserta Musrenbangcam	100 %	100 %	100 %	-	-
	9. Prosentase Lembaga Desa yang aktif		18 Desa	100 %		
<b>Rata-rata capaian sasaran 3</b>				<b>100%</b>	99 %	55 %

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -2, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 9 indikator kinerja , sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan Kemandirian Desa, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa;
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral setiap Bulan;

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019, pada sasaran -2 telah mencapai **100 %** Hal ini berarti terhadap capaian sasaran sesuai target yang telah ditetapkan

- Efisiensi =  $100 \% - \left( \frac{308.616.960}{309.297.500} \times 100 \% \right)$

$$= 2 \%$$

- Efektivitas =  $\left( \frac{102}{100} \times 100 \% \right)$

$$= 102 \%$$

**c. Sasaran - 3 :**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -3, dengan 3 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan dan capaian kinerja	1. Dokumen Laporan Keuangan	2 Dok	2 Dok	100 %	100 %	100 %
	2. Dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %
	3. Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-rata capaian sasaran 3</b>				100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -3, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja, semua indikator capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, usaha untuk meningkatkan Tertib Pelaporan administrasi Keuangan dan Capaian Kinerja target 100 % tercapai 100 %.

Pencapaian kinerja Tahun 2019 sesungguhnya sama apabila di bandingkan dengan tahun 2018.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengirimkan Laporan Keuangan Tepat waktu;
2. Menyusun dan Mengirimkan Dokumen LAKJIP dan Renja tepat waktu ;

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019, pada sasaran -3 telah mencapai 100 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -3 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

- Efisiensi =  $100 \% - \left( \frac{12.000.000}{12.000.000} \times 100 \% \right)$

$$= 0 \% \quad 12.000.000$$

- Efektivitas =  $\left( \frac{100}{100} \times 100 \% \right)$   
= 100 %

#### d.Sasaran -4

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -4, dengan 4 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian tahun 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	1. Jumlah Pemantauan Desa rawan	14 kali	14 kali	100%	100 %	100 %
	2. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas	18 Desa	18 Desa	100 %	100 %	100 %
	3. Pelaksanaan HUT RI	1 Kali	1 Kali	100%	100 %	100 %
	4. Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100 %	1 Kali 100 %	100 %	100 %	-
<b>Rata-rata capaian sasaran 3</b>				<b>100%</b>	100 %	75%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -4, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 4 indikator kinerja , sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, usaha untuk meningkatkan Rasa Aman Masyarakat dengan target 100 % tercapai 100 %.

Dalam rangka meningkatkan Rasa Aman Masyarakat , upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban melalui Koordinasi dengan Forkompimcam;
- Mengadakan Pembinaan Linmas desa;

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019, pada sasaran -4 telah mencapai **100 %** Hal ini berarti terhadap capaian sasaran sesuai target yang telah ditetapkan

- Efisiensi =  $100 \% - \left( \frac{44.989.890}{45.000.000} \times 100 \% \right)$   
= 1 %

- Efektivitas= (  $\frac{101}{100} \times 100\%$  )  
= 101 %

## **2. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Sumber melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2019 dikategorikan Amat Baik.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 01

Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian tahun 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.125	1.874	88 %	126 %	202 %
	2. Jumlah pelayanan KK	3.000	2.88	70 %	80 %	185 %
	3. Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk	300	198	67%	77 %	188 %
	4. Waktu Pelayanan Dispensasi Nikah	95	70	74 %	173 %	71 %
	5. Jumlah Pelayanan Numpang Nikah	130	145	111 %	166%	71 %
	6. Jumlah Pelayanan SKTM	1.550	277	18 %	300 %	108 %
	7. Waktu Pelayanan SKCK	300	223	75%	20 %	95 %
	8. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin HO/IMB	20	8	40 %	70 %	160 %
	9. Jumlah Pelayanan Ijin UMKM	50	0	0 %	80 %	0 %
	10. Jumlah Pelayanan PPAT	50	5	10 %	0 %	10 %
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 1</b>				<b>55,3 %</b>	<b>109 %</b>	<b>109 %</b>

Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Jumlah Desa yang menyusun LPPD	100%	100 %	100 %	100 %	0 %
	2. Jumlah Desa Yang menyusun LKPJ	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
	3. Jumlah Desa Yang tertib menyusun SPJ	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	4. Jumlah Desa yang menyusun APBdesa	100 %	100%	100 %	99.9%	100 %
	5. Prosentase Pelunasan PBB				%	
		12 Kali	12 kali	100%	100 %	0 %
	6. Rapat Koordinasi Lintas sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	7. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	18 desa	18 desa	100%	100 %	100%
	8. Jumlah Desa Peserta Musrenbangcam	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
9. Prosentase Lembaga Desa yang aktif						
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 2</b>				<b>100 %</b>	<b>99 %</b>	<b>55%</b>
Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan	1. Dokumen Laporan Keuangan	2 Dok	2 Dok	100 %	100 %	100 %
	2. Dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %
	3. Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %

dan Capaian Kinerja						
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 3</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
Meningkatn yRasa Aman Masyarakat	1. Jumlah Pemantuan Desa Rawan Bencana	14 Desa	14 Desa	100 %	100 %	100 %
	2. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas	18 Desa 1 Kali	18 Desa	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 0%
	3. Pelaksanaan HUT RI	100 %	1 Kali 100 %			
	4. Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat					
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 4</b>				<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>75 %</b>
<b>Rata Rata Capaian Sasaran 1 s/d 4</b>				<b>88,9</b>	<b>107 %</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat di lihat rata rata capaian kinerja dari sasaran 1 s/d 4 tercapai 88,9 % dari target yang telah ditetapkan.

## B. Perbandingan Renstra Lama dan Resntra Baru

No	Renstra Lama		Renstra Baru	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa	1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kep	1. Peningkatan Manajemen Adminiatrasi Pelayanan Umum 2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

		<p>Administrasi Keuangan</p> <p>4. Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan</p> <p>9. Penyediaan makann dan minuman</p> <p>10. Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan</p> <p>11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>12. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah</p> <p>2.</p>	<p>egawaian dan Keuangan Perangkat daerah</p>	<p>4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan</p>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	<p>1. Pengadaan Perlengkapan kantor</p> <p>2. Pengadaan Peralatan Kantor</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor</p> <p>7. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pertemuan</p> <p>8. Penataan Lingkungan Kantor</p>	<p>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>3</p>
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>1. Pembinaan Internal Pegawai</p>	<p>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik</p>
4	Program Peningkatan	<p>1. Penyusunan Renstra dan Renja</p>	<p>Program Peningkatan</p>	<p>1. Fasilitasi Penyelenggaraan</p>

	n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		n Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Desa/Kelurahan 2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat desa 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
5	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi PATEN</li> <li>2. Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa</li> <li>4. Penyelenggaraan Musrenbang cam</li> <li>5. Fasilitasi MTQ/STQ</li> <li>6. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>7. Pembinaan Anggota hansip/linmas</li> <li>8. Promosi PHBS</li> <li>9. Validasi data miskin kecamatan</li> <li>10. Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan dan anak tingkat kecamatan</li> <li>11. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kecamatan</li> <li>12. Fasilitasi Kegiatan olahraga</li> <li>13. Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM</li> <li>14. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)</li> <li>15. Penguatan Pokjantal Posyandu</li> <li>16. Penguatan Pendidikan karakter Anak Usia Dini</li> <li>17. Penunjang Pemilihan Kepala Desa</li> </ol>		

### C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sumber tahun anggaran 2019, yaitu :

Pada tahun 2019 Kantor Kecamatan Sumber mendapatkan Anggaran sebesar Rp.702.572.500,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 698.882.643,- atau terserap 99 %

<b>No</b>	<b>Program/Keg</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Prosentase</b>
I	Program Pelayanan Administrsi Perkantoran	216.300.000	214.486.293	1.813.707	99,16 %
	1.Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik	12.800.000	11.164.493	1.635.507	87,22 %
	2.Penyediaan Jasa Administrsi Keuangan	63.000.000	63.000.000	0	100%
	3.Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.000.000	21.000.000	0	100%
	4.Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	0	100%
	5.Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	0	100%
	6.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	0	100%
	7.Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	3.000.000	3.000.000	0	100%
	8.Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	24.822.000	178.000	99,91%
	9.Penyediaan jasa administrsi kantor/kebersihan	42.500.000	42.499.800	200	100%
	10.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000	20.000.000	0	100%
	11.Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	5.000.000	5.000.000	0	100%
	12.Penyediaan jasa	1.000.000	1.000.000	0	100%
II		102.725.000	101.540.050	1.184.950	98,79%

	Peralatan dan Perlengkapan kantor	10.000.000	9.912.000	88.000	100%
		13.500.000	13.500.000	0	100 %
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	11.500.000	11.500.000	0	100%
	1.Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	0	100%
	2.Pengadaan Peralatan kantor	15.000.000	14.003.200	996.800	99,39%
	3.Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	7.725.000	7.725.000	0	100%
	4.Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	5.000.000	5.000.000	0	100 %
		20.000.000	19.899.850	100.150	99,09%
	5.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasioanl	5.000.000	5.000.000	0	100%
III	6.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	5.000.000	5.000.000	0	100%
IV	7.Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung pertemuan	12.000.000	11.999.800	200	100%
	8.Penataan Lingkungan Kantor	12.000.000	12.000.000	200	100%
V	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	366.547.500	365.856.500	691.000	99.8 %
		12.250.000	12.249.850	150	99.99 %
	1.Pembinaan Internal Pegawai	35.000.000	34.999.940	60	100 %
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.197.500	63.175.615	21.885	99.9 %
		30.000.000	29.600.000	400.000	99 %
	1.Penyusunan Renstra dan Renja	23.920.000	23.900.000	20.000	99.9 %
	Program Penunjang Pemerintah Desa	30.000.000	29.989.820	10.180	100%
	1.Fasilitasi PATEN	10.000.000	9.989.950	10.050	99.89%

2. Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	10.000.000	9.999.950	50	100%
	4.830.000	4.809.350	20.650	99.57 %
3. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desaa	10.000.000	9.979.350	20.650	99.90%
4. Penyelenggaraan Musrenbangcam	15.000.000	14.999.435	565	100 %
5. Fasilitasi MTQ/STQ	5.000.000	4.820.000	180.000	96 %
6. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	10.000.000	9.999.800	200	100 %
7. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas	23.850.000	23.849.390	650	100 %
8. Promosi PHBS	10.000.000	10.000.000	0	100 %
9. Validasi data Miskin Kecamatan	51.000.000	50.994.400	5.600	99.99 %
10. Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan dan anak tingkat Kecamatan	22.500.000	22.499.850	150	99.99%
11. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tk Kec				
12. Fasilitasi Kegiatan Olahraga				
13. Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM				
14. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)				
15. Penguatan Pokjandal Posyandu				
16. Penguatan Pendidikan Karakter anak Usia Dini				
17. Penunjang Pemilihan Kepala Desa				
Jumlah	702.572.500	698.882.643	3.689.857	99 %

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Kantor Kecamatan Sumber sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Sumber melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (**Amat Baik / Baik / Cukup Baik/Kurang**) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 88,9 % , dengan rincian :

sasaran 1 : 55.5 %

sasaran 2 : 100 %

sasaran 3 : 100 %

Sasaran 4 : 100%

b. Kecamatan Sumber menggunakan dana sebesar Rp.698.882.643,- dana yang dianggarkan Rp .702.572.500, . Hal ini berarti terjadi efisiensi 1 % dari anggaran yang disediakan

## **B.Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Pembuatan KTP dan KK on Line terpengaruh jaringan komunikasi;
2. Adanya Perubahan Regulasi Pelayanan SKTM dan Pelayanan Perijinan UMKM
- 3.Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang Pelayanan Publik

## **C.Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Perbaiki Jaringan Online
2. Optimalisasikan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Informasi Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LKJIP) diharapkan dapat digunakan sebagai masukan didalam melaksanakan Program/kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya ,agar potensi /kendala dapat diantisipasi serta potensi peluang dapat diciptakan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk SKPD Kantor Kecamatan Sumber semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Rembang, 5 Januari 2020

**CAMAT SUMBER**

**KAMDANI,S.IP,S.Sos**

NIP. 19630302 198602 1 005

# **PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

## **KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp ( 0295 ) 5504464 Sumber 59253

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam Rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMDANI,S.IP,S.Sos

Jabatan : CAMAT SUMBER

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H.ABDUL HAFIDZ

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 23 Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H.ABDUL HAFIDZ

KAMDANI,S.IP,S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19630302 198602 1 005

### FAKTA INTEGRITAS

Saya KAMDANI,S.IP,S.Sos Jabatan CAMAT SUMBER menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindari pertentangan kepentingan ( Conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang –undangan dalam melaksanakan tugas,terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan, dan
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya :

Rembang, 23 Januari 2019

Menyaksikan  
BUPATI REMBANG

Pembuat Pernyataan

**H.ABDUL HAFIDZ**

**KAMDANI,S.IP,S.Sos**  
Penata Tk.I  
NIP.19630302 198602 1 005







